

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Grand Theory**

##### **2.1.1. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)**

Teori legitimasi dikemukakan pertama kali oleh Dowling & Pfeffer (1975), ia menyatakan bahwa legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan agar mampu untuk dapat survive dan bertahan hidup. Teori legitimasi berakar pada gagasan perjanjian sosial antar korporasi dan masyarakat. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan suatu perusahaan bergantung pada kemampuannya untuk menyampaikan tujuan yang diinginkan untuk mendistribusikan manfaat baik dalam bidang ekonomi, sosial, atau politik kepada masyarakat dimana ia memperoleh kekuatannya (Shocker & Sethi, 1973).

Legitimasi teori atau legitimacy theory menjelaskan bahwa organisasi secara kontinyu akan beroperasi sesuai dengan batas-batas dan nilai yang diterima oleh masyarakat di sekitar perusahaan dalam usaha untuk mendapatkan legitimasi. Norma perusahaan selalu berubah mengikuti perubahan dari waktu ke waktu sehingga perusahaan harus mengikuti perkembangannya. Usaha perusahaan mengikuti perubahan untuk mendapatkan legitimasi merupakan suatu proses yang dilakukann secara berkesinambungan (Deegan, 2004 dalam Istiqomah, Lutvia, et al. 2022).

Teori legitimasi kaitannya dengan kinerja sosial dan kinerja keuangan adalah apabila jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai

masyarakat (sering disebut *legitimacy gap*), maka perusahaan dapat kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Lindblom dalam Gray et al., 1995 dalam Hutabarat, Ance Cessilia. 2015).

### **2.1.2. Tata Kelola**

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tata kelola (*governance*) didefinisikan sebagai suatu bentuk atau proses penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola problem yang dihadapi oleh masyarakat atau bangsa dengan melibatkan semua sektor antara lain: sektor publik, sektor privat (swasta), dan sektor ketiga yaitu *civil society*. *Governance* merupakan sistem interaksi dimana proses-proses politik, ekonomi, dan administrasi diselenggarakan secara demokratis, akuntabel, dan partisipatorik dengan melibatkan semua aktor dan *stakeholder* (Asaduzzaman, 2020).

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang tata kelola perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), prinsip-prinsip tata kelola perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
- b. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan tersebut juga memiliki manfaat yang besar bagi perusahaan dan stakeholder yaitu dengan penerapan prinsip-prinsip diatas maka *stakeholder* dapat mengetahui risiko yang mungkin timbul dari transaksi yang dilakukann dengan perusahaan.

## 2.2. Middle Theory

### 2.2.1. Audit

Pengertian Audit Menurut *A Statement of Basic Auditing Concepts* atau yang disingkat ASOBAC menyatakan, Audit merupakan sebuah proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti kejadian ekonomi secara objektif mengenai kebijakan serta aktivitas ekonomi untuk menentukan tingkat kecocokan/kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

Menurut Mulyadi (2014:9) definisi auditing secara umum adalah :

“Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”

Menurut Hery (2017:10) definisi auditing secara umum adalah :

“Pengaudit (auditing) didefinisikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara objektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”

Menurut Agoes (2017) definisi auditing secara umum adalah:

“Audit merupakan pemeriksaan yang dilakukann secara kritis dan sistematis oleh pihak yang *independen* terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.”

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2019), menyatakan:

“bahwa audit adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukann seseorang yang kompeten dan *independen* untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan definisi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa audit adalah serangkaian pemeriksaan yang dilakukann oleh auditor yang *independen* secara sistematis dan objektif dengan didukung dengan laporan-laporan keuangan serta catatan lainnya yang mendukung untuk memberikan pendapat kewajaran atas laporan yang telah dibuat oleh suatu entitas.

#### **2.2.1.1. Jenis-Jenis Audit**

Jenis-jenis audit menurut Alvin A. Arens, et al. (2017: 36-38) adalah sebagai berikut:

- (1) **Audit Operasional (*Operational Audit*)**  
Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi di setiap bagian. Pada penyelesaian audit operasional, pihak manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi dari auditor untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan tersebut.
- (2) **Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)**  
Audit kepatuhan dilakukann untuk menentukan apakah auditee (klien) telah mengikuti prosedur khusus/tertentu, aturan, atau peraturan yang ditetapkan oleh beberapa otoritas yang lebih tinggi, seperti ketentuan hukum, peraturan pemerintah, persyaratan pinjaman dari bank dan lain-lain. Hasil audit kepatuhan biasanya tidak dilaporkan kepada pihak luar tetapi hanya dilaporkan pada 9 pihak yang terkait dalam pembuatan kriteria-kriteria tersebut. Pimpinan organisasi adalah pihak yang paling berkepentingan atau dipatuhinya aturan yang telah ditetapkan, oleh sebab itu merekalah yang mempekerjakan auditor.
- (3) **Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)**  
Audit laporan keuangan dilakukann untuk menentukan apakah laporan keuangan dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Pada umumnya, kriteria ini adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Biasanya, auditor dapat melakukan audit laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan basis kas atau basis lain akuntansi yang tepat bagi organisasi.

### 2.2.1.2. Opini Audit

Laporan audit adalah langkah paling akhir dari seluruh proses audit. Dengan demikian auditor dalam memberikan opini atas dasar pada keyakinan profesionalnya. Opini audit melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Opini Auditor adalah pendapat Auditor yang didasarkan dari hasil audit. Auditor menyatakan pendapatnya berdasarkan audit yang dilakukann sesuai dengan standar audit dan temuannya (Mukhtaruddin *et al.* 2015).

Opini audit didefinisikan oleh Yanthi *et al.* 2020:150 sebagai berikut:

Opini audit merupakan simpulan dari proses audit yang dilakukann oleh auditor dan juga merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor atas kewajaran suatu laporan keuangan. Auditor menyatakan pendapat berpijak pada audit yang dilaksanakan berdasarkan dan atas temuan-temuannya.

Menurut IAI (2001) dalam SA Seksi 326 bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor *independen* pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor juga merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Menurut Mulyadi, 2013:46 dalam Ayu Manisha 2022:9 macam-macam opini audit ada lima opini yang biasa dikeluarkan oleh auditor, antara lain:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)  
Dalam pendapat ini, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal dan harus sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Pendapat ini diberikan jika terpenuhi kondisi berikut:

- a. Semua laporan keuangan terdapat dalam laporan keuangan.
  - b. Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor.
  - c. Bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkannya untuk melaksanakan tiga standar pekerjaan lapangan.
  - d. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
  - e. Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambahkan paragraf penjelasan atau modifikasi kata kata dalam laporan audit.
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified opinion with explanatory language*).
- Dalam keadaan tertentu auditor menambahkan suatu paragraf atau bahasa penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragraf penjelasan ini dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menyebabkan dikeluarkannya opini ini adalah:
- a. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum.
  - b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas.
  - c. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh dewan standar akuntansi keuangan.
  - d. Penekanan atas suatu hal.
  - e. Laporan audit yang melibatkan auditor lain.
3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified opinion*).
- Laporan keuangan yang disajikan perusahaan dalam keadaan wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, kecuali untuk dampak hal hal yang dikecualikan:
- a. Tidak adanya bukti yang kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap ruang lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak memberikan pendapat.
  - b. Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum dan berdampak material, sehingga auditor mengeluarkan opini tidak wajar.
4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*).
- Dengan pendapat tidak wajar, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
5. Opini tidak memberikan pendapat (*Disclaimer opinion*).
- Pernyataan tidak memberikan pendapat diberikan auditor jika auditor tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat juga dapat diberikan oleh auditor jika ia dalam kondisi tidak *independen* dalam hubungannya dengan klien. Dalam standar Professional Akuntan Publik (SPAP) SA seksi 110 dijelaskan tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor *independen* umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal

yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia.

### **2.3. Applied Theory**

#### **2.3.1. Opini Audit Going Concern**

Opini audit *Going Concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang ditentukan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015). Opini *Going Concern* mengasumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas sehingga jika suatu entitas mengalami kondisi yang berlawanan dengan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas tersebut dimungkinkan mengalami masalah untuk survive. Sekalipun tujuan audit bukan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan, auditor memiliki tanggung jawab menurut SAS (AU 341) untuk mengevaluasi apakah perusahaan mempunyai kemungkinan untuk bertahan. Arens, 2008 dalam Wahasusmiah, R., Indriani, P., & Pratama, M. I. P. (2019).

Berikut terdapat beberapa kejadian atau peristiwa yang bisa mengakibatkan keraguan besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya yang sudah tercantum dalam IAPI 2011 dalam Pradika, 2017:19.

1. Trend negatif sebagai contoh; kerugian usaha yang terjadi terus menerus; kurangnya modal kerja; arus kas negatif dari kegiatan usaha; dan rasio keuangan penting yang jelek.
2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, sebagai contoh, kegagalan dalam membayar kewajiban utangnya atau kontrak serupa; penunggakan dalam membayar dividen penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa; restrukturisasi utang; kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru; atau penjualan sebagian besar aktiva.



3. Masalah intern, sebagai contoh, pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain; ketergantungan besar atas sukses proyek tertentu; komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis; serta kebutuhan secara signifikan memperbaiki operasi.
4. Masalah ekstern, sebagai contoh, pengaduan gugatan pengadilan; keluarnya undang-undang atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi; kehilangan franchise, lisensi atau paten penting; kehilangan pelanggan atau pemasok utama; kerugian akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir, dan kekeringan yang tidak diasuransikan namun dengan pertanggungan yang tidak memadai.

Apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa seperti yang telah disebutkan diatas, auditor tidak menyangsikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas maka auditor menerbitkan pendapat wajar tanpa pengecualian. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, maka auditor harus mempertimbangkan rencana manajemen dalam menghadapi dampak merugikan dari kondisi atau peristiwa yang mengindikasikan adanya keraguan besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Menurut Pradika, Rizka Ardhi (2017) Pertimbangan auditor yang berhubungan dengan rencana manajemen meliputi:

1. Rencana untuk menjual aktiva.
2. Rencana penarikan utang atau restrukturisasi utang.
3. Rencana untuk mengurangi atau menunda pengeluaran.
4. Rencana untuk menaikkan modal pemilik.

Pradika, Rizka Ardhi (2017) Pertimbangan dampak informasi kelangsungan hidup entitas terhadap laporan auditor meliputi:

1. Jika setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa auditor tidak menyangsikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas maka auditor menyajikan pendapat wajar tanpa pengecualian.
2. Apabila setelah mempertimbangkan dampak peristiwa auditor menyangsikan kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas maka auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen. Dalam hal perusahaan tidak memiliki rencana manajemen atau auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen perusahaan tidak secara efektif mengurangi dampak negatif kondisi atau peristiwa tersebut maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat.
3. Apabila auditor telah berkesinambungan bahwa rencana manajemen dapat secara efektif dilaksanakan maka auditor harus mempertimbangkan kecukupan pengungkapan mengenai sifat dan dampak kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan keyakinan adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup perusahaan dan rencana manajemen. Namun jika auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan tersebut memadai maka auditor akan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
4. Bila auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan tersebut tidak memadai maka auditor akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa opini audit *Going Concern* bisa dilihat dari kondisi keuangan suatu perusahaan, karena kondisi keuangan dapat mencerminkan kondisi perusahaan itu sendiri serta kondisi keuangan juga dapat memprediksi dari kelangsungan perusahaan itu sendiri. Maka dari itu jika perusahaan memiliki kondisi yang kurang baik dalam kurun waktu tertentu maka auditor akan mengeluarkan opini audit *Going Concern* terhadap perusahaan tersebut.

### 2.3.2. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan didefinisikan oleh Sudarmadji dan Sularto, 2007 dalam Pradika 2017:24 sebagai:

Ukuran perusahaan adalah merupakan gambaran dari suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar atau kecil yang dapat dilihat melalui total aset, penjualan bersih, kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan besar atau kecil dapat menentukan kemungkinan perusahaan untuk bangkrut atau mampu bertahan.

Menurut Wibowo, 2021 menyatakan bahwa:

Perusahaan yang memiliki total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang lama, selain itu perusahaan dianggap relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan ukuran besar lebih mudah mendapatkan sumber pendanaan.

Dinda Ayu Manisha 2021:13 menyatakan bahwa:

Berbeda dengan perusahaan kecil yang kemungkinan besar mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban hutangnya (*Debt Default*), bagi perusahaan besar dengan besarnya sumber aset, maka kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutangnya dapat diatasi dengan memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan sebuah pengelompokan perusahaan kedalam tiga kelompok yaitu perusahaan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diketahui melalui total aset, total penjualan, total laba, dan lainnya (Denziana dan Monica, 2016).

Perusahaan-perusahaan yang besar memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk memberikan pengungkapan yang transparan daripada perusahaan kecil. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 1 dalam Dinda Ayu Manisha 2020:13 menyebutkan klasifikasi ukuran perusahaan dibagi kedalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukann oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukann oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukann oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari 14 usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, 24 usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Dalam penelitian ini menurut Rizkillah dan Nurbaiti (2018) ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aktiva. Total aset dipilih sebagai proksi atas ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan, bahwa nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai market capitalized dan penjualan. Rumus untuk menghitung ukuran perusahaan sebagai berikut :

$$\text{Size} = \text{Ln} (\text{Total Asset})$$

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total asset yang

kecil. Wardani & Hermuningsih, 2011 dalam Nasution, Muhammad Syafril, 2020:52.

### **2.3.3. *Financial Distress***

Yazdanfar dan Ohman (2020) *Financial Distress* merupakan kondisi keuangan suatu perusahaan sedang dalam masalah, krisis atau tidak sehat yang terjadi sebelum mengalami kebangkrutan. Perusahaan yang memiliki pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan bisa disebabkan oleh beberapa kondisi, di antaranya perusahaan memiliki banyak aset yang tidak likuid, tingginya biaya tetap tinggi dan pendapatan yang sensitif akan isu ekonomi. Kondisi tersebut bisa menyebabkan perusahaan berada di kondisi *financial distress*, jika tidak segera ditangani dan kondisi keuangan perusahaan yang kian menurun dalam kurun waktu tertentu dan tidak ada tanda-tanda kenaikan kinerja keuangan bisa menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan.

Definisi *Financial Distress* menurut Ross and Westerfield (1996) dalam Finishtya (2019:111) adalah *Financial Distress is a condition where the company's operating cash flow is not able to cover or meet the current liabilities, and that Financial Distress can lead a company into failure (bankruptcy)*. *Financial Distress* dapat diminimalisir dengan melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan. Pengawasan tersebut sebaiknya dilakukann oleh tim manajemen menggunakan metode analisis laporan keuangan. Analisis yang dapat dilakukann manajemen untuk meminimalisir *financial distress* adalah dengan menganalisis rasio keuangan dan analisis arus kas. Analisis rasio membantu untuk manajemen dalam mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan apakah kondisi keuangan

mengalami peningkatan atau kondisi keuangan mengalami penurunan selama masa operasional.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan arus kas operasi sebagai fokus utama, hal ini dikarenakan jika suatu perusahaan mempunyai arus kas operasi yang cukup tinggi, maka perusahaan tersebut mempunyai sumber daya yang cukup untuk melakukan kegiatan operasionalnya, seperti melunasi pinjaman, mempertahankan operasional perusahaan, dan melakukan investasi baru tanpa bergantung pada sumber pendanaan eksternal. Amelia (2017) dalam Finistya (2019:111), *the cash flow variabel from the operational activities may show that the level (high or low) or operational cash flow can cause a company to experience Financial Distress.*

kesulitan keuangan merupakan kesulitan likuiditas sehingga perusahaan tidak mampu menjalankan kegiatan operasinya dengan baik (Trijadi, 1999) dalam Ayu Manisha, Dinda (2022:14). Kesulitan keuangan dapat diartikan dalam beberapa kategori yaitu sebagai berikut :

1. *Economic Failure*, yaitu kegagalan ekonomi yang berarti bahwa pendapatan perusahaan tidak dapat menutup biayanya sendiri. Ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal.
2. *Business Failure*, didefinisikan sebagai usaha yang menghentikan operasinya dengan akibat kerugian bagi kreditur, dan kemudian dikatakan gagal meskipun tidak melalui kebangkrutan secara normal.
3. *Technical insolvency*, sebuah perusahaan dapat dinilai mengalami kesulitan keuangan apabila tidak memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. *Technical insolvency* ini menunjukkan kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara dimana pada suatu waktu perusahaan dapat mengumpulkan uang untuk memenuhi kewajibannya dan tetap beroperasi.
4. *Insolvency in Bankruptcy*, sebuah perusahaan dapat dikatakan mengalami kesulitan keuangan bilamana nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar dari asset perusahaan.
5. *Legal Bankruptcy*, sebuah perusahaan dikatakan sebagai bangkrut secara hukum, kecuali diajukan tuntutan secara resmi dengan undang-undang.

Pengukuran *financial distress* dapat dilakukann dengan menggunakan beberapa metode yaitu Springate, Zmijewski, dan salah satu model kesulitan keuangan yang paling terkenal adalah Altman *Z-score*. Metode *Z-score* Altman merupakan indikator untuk mengukur potensi kebangkrutan (*Financial Distress*) suatu perusahaan. *Z-score* dikembangkan oleh Edward I Altman, Ph.D, seorang profesor dan ekonom keuangan dari New York University's Stern School Of Business pada tahun 1968.

Beberapa studi telah dilakukann untuk mengetahui kegunaan analisis rasio keuangan dalam memprediksi kegagalan atau kebangkrutan usaha. Salah satu studi yang mempelajari tentang prediksi ini adalah multiple discriminant analysis yang telah dilakukann oleh Altman atau Edward I. Altman. Penelitian yang dilakukann oleh Altman yaitu mencari kesamaan rasio keuangan yang biasa dipakai untuk memprediksi kebangkrutan untuk semua negara studinya. Analisis kebangkrutan Z adalah suatu alat yang digunakan untuk meramalkan tingkat kebangkrutan suatu perusahaan dengan menghitung nilai dari beberapa rasio kemudian dimasukkan dalam suatu persamaan diskriminan.

Altman telah mengkombinasikan beberapa rasio menjadi model prediksi dengan teknik statistik, yaitu analisis diskriminan yang digunakan untuk memprediksi terjadinya kebangkrutan perusahaan dengan istilah *Z-score*. *Z-score* merupakan score yang ditentukan dari hitungan standar yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Formula *Z-Score* untuk memprediksi kebangkrutan dari Altman merupakan sebuah multivariate formula yang digunakan untuk mengukur kesehatan finansial dari sebuah perusahaan.

Altman menemukan lima jenis rasio keuangan yang dapat dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan yang tidak bangkrut.

Altman *Z-Score* ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Z\text{-Score} = 1,2X_1 + 1,4 X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$$

(Altman, 1968:594)

Keterangan :

$X_1$  = Modal kerja terhadap Total Aktiva (*Working Capital to Total Assets*)

$X_2$  = Laba yang ditahan terhadap Total Aktiva (*Retained Earnings to Total Assets*)

$X_3$  = Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap Total Aktiva (*Earnings Before Interest and Taxes to Total Assets*)

$X_4$  = Nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku dari hutang (*market value equity to book value of total debt*)

$X_5$  = Penjualan terhadap Total Aktiva (*Sales to Total Asset*)

Menurut Altman nilai *Z* merupakan angka yang akan menjelaskan pada perusahaan apakah perusahaan mengalami kesulitan dalam keuangan maupun sedang mengalami kebangkrutan, pada altman pertama nilai *Z* dikategorikan menjadi 3, yaitu:

- a. Jika nilai  $Z < 1,8$  maka termasuk perusahaan yang bangkrut.
- b. Jika nilai  $1,8 < Z < 2,99$  maka termasuk *grey area* (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan).
- c. Jika nilai  $Z > 2,99$  maka perusahaan tidak bangkrut.



Seiring berjalannya waktu Altman merevisi rumusnya sehingga pada 1983 Altman mengembangkan dua model lanjutan *Z-Score* dengan menggunakan sampel perusahaan swasta dan perusahaan non-manufaktur. Sehingga, model Altman (1983) lebih relevan untuk semua perusahaan. Untuk perusahaan swasta, karena informasi harga saham tidak tersedia, Altman mengganti nilai pasar ekuitas (*Market Value Of Equity*) pada variabel  $X_4$  dengan nilai buku ekuitas (*book value of equity*) pemegang saham. Model Altman *Z-Score* untuk perusahaan swasta adalah:

$$Z = 0,717X_1 + 0,847X_2 + 3,108X_3 + 0,42X_4 + 0,988X_5$$

(Idi, Cintya Meiske, and Johanis Darwin Borolla. 2021)

Untuk Model revisi 1983, nilai *Z-Score* yang bagus untuk untuk perusahaan swasta, yaitu:

- a. Jika nilai  $Z' < 1,23$  maka termasuk perusahaan yang bangkrut.
- b. Jika nilai  $1,23 < Z' < 2,9$  maka termasuk grey area (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan).
- c. Jika nilai  $Z' > 2,9$  maka perusahaan tidak bangkrut.

Pada tahun 1984, banyak peneliti yang memodifikasi Altman *Z-Score* agar lebih produktif terlebih saat digunakan dalam sektor industri tertentu. Dalam model ini rasio penjualan terhadap total aset dihilangkan dengan harapan bahwa dapat memberi efek industri. Selain menghilangkan rasio penjualan terhadap total aset, sampel yang digunakan diganti menjadi perusahaan dari negara berkembang dengan adanya perubahan rumus *Z-Score* modifikasi menjadikan *Z-Score* lebih

fleksibel karena dapat digunakan untuk perusahaan go public maupun perusahaan *non public*. Berikut rumus nilai Altman Modifikasi:

$$Z = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Menurut Altman, E. I., & Hotchkiss, E. (2010:267)

$X_1$  = terhadap Total Aktiva (*Working Capital to Total Assets*)

$X_2$  = Laba yang ditahan terhadap Total Aktiva (*Retained Earnings to Total Assets*)

$X_3$  = Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap Total Aktiva (*Earnings Before Interest and Taxes to Total Assets*)

$X_4$  = Nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku dari hutang (*market value equity to book value of total debt*)

Adapun nilai  $Z$  yang digunakan sebagai acuan untuk mengkategorikan perusahaan pada model modifikasi ini yaitu;

- a. Jika nilai  $Z'' < 1,1$  maka termasuk perusahaan yang bangkrut.
- b. Jika nilai  $1,1 < Z'' < 2,6$  maka termasuk *grey area* (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan).
- c. Jika nilai  $Z'' > 2,6$  maka Perusahaan tidak bermasalah dengan kondisi keuangan (zona aman).

#### 2.3.4. Default

Menurut Tihar et al., (2021) *Debt default* atau *Default* adalah kegagalan suatu perusahaan sebagai debitur untuk membayar utang pokok atau bunga sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Fokus utama auditor saat mengaudit laporan keuangan adalah besarnya hutang perusahaan kepada kreditur. Ketika perusahaan memiliki hutang yang besar, pendanaan Perusahaan akan lebih banyak dialokasikan untuk pembayaran hutang beserta bunga nya kepada kreditur.

Definisi *Default* didefinisikan oleh PSA No. 30 sebagai:

*Debt Default* merupakan salah satu indikator *Going Concern* yang digunakan auditor dalam mempertimbangkan kelangsungan hidupnya, *Default* nya suatu hutang ini disebabkan oleh kurangnya likuiditas perusahaan dalam membayar hutang pokok dan bunganya pada saat jatuh tempo.

Tihar, A., Sari, I. P., & Handoko, B. L. (2021) menyatakan bahwa:

Hutang menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh auditor karena ini menyangkut pihak ketiga yang mana memiliki hak atas harta yang dipinjamkan kepada perusahaan. Hutang juga menjadi fokus saat auditor memeriksa kondisi keuangan perusahaan, ketika perusahaan memiliki hutang yang nominalnya besar maka sebagian besar aliran kas perusahaan dialokasikan untuk menutupi pelunasan hutang serta bunga nya, maka operasional perusahaan akan terhambat karena aliran kas perusahaan yang tidak dipakai untuk proses operasional perusahaan.

Dalam penelitian ini informasi status *Default* dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan (pada pos hutang) perusahaan atau di dalam laporan audit *independen* dengan indikasi adanya restrukturisasi hutang dengan debitur. *Default* diukur menggunakan variabel *dummy* dimana kategori 1 untuk perusahaan yang menerima status *debt Default* dan 0 untuk perusahaan yang tidak menerima status *Default* diukur untuk menunjukkan apakah perusahaan dalam keadaan *Default* atau tidak sebelum opini audit dikeluarkan.

## 2.4. Kajian Teori Hubungan

### 2.4.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit *Going Concern*

Pada Standar Audit 570 dinyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit *Going Concern*.

Dalam pernyataannya Junaidi, Jogiyanto Hartono (2010) menyatakan bahwa:

Perusahaan dengan total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan karena dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam waktu yang panjang. Perusahaan besar juga dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan ukuran perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan perusahaannya semakin besar perusahaan, perusahaan memiliki kemampuan lebih dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan keuangannya namun bukan berarti perusahaan besar akan lepas dari opini audit *Going Concern*, opini ini diberikan dengan banyak pertimbangan dari seorang auditor. Maka dari itu ukuran perusahaan mempengaruhi opini audit *Going Concern*. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukann oleh Indra K (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit dengan penekanan *Going Concern*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki kemungkinan kecil untuk menerima opini audit *Going Concern*.

#### **2.4.2. Pengaruh *Financial Distress* Terhadap Opini Audit *Going Concern***

Dalam bukunya Khaira Amalia Fachrudin (2008:64) menyatakan bahwa:

Perusahaan yang lebih besar lebih mungkin menjadi bangkrut karena sulit menjaga kelangsungan operasi selama masa kesulitan keuangan (*financial distress*). Likuiditas dan profitabilitas berpengaruh, semakin meningkat, kemungkinan bangkrut berkurang.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Financial Distress* merupakan kondisi keuangan yang memburuk sehingga berpotensi tidak bisa menjaga kelangsungan operasinya sehingga auditor bisa mengeluarkan opini audit *Going Concern*. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aghisna, M. R. dkk (2023) menunjukkan hasil yang positif bahwa *Financial Distress* berpengaruh pada penerimaan opini audit *Going Concern*. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh R., Sumiati, A., & Purwohedi, U. (2023) yang menyatakan bahwa *Financial Distress* mempunyai pengaruh yang positif terhadap auditor dalam memberikan opini audit *Going Concern*.

#### **2.4.3. Pengaruh *Default* Terhadap Opini Audit *Going Concern***

Dalam bukunya Arens (2014:768) menyatakan bahwa:

*“Auditing standards require the auditor to evaluate whether there is a substantial doubt about a client’s ability to continue as a Going Concern for at least one year beyond the balance sheet date. Auditors make that assessment initially as a part of planning but may revise it after obtaining new information. For example, an initial assessment of Going Concern may need revision if the auditor discovers during the audit that the company has Defaulted on a loan, lost its primary customer, or decided to dispose of substantial assets to pay off loans.”*

Terjemahan:

Standar audit mengharuskan auditor untuk mengevaluasi apakah ada keraguan substantif tentang kemampuan klien untuk melanjutkan kelangsungan hidup selama setidaknya satu tahun setelah tanggal neraca. Auditor membuat penilaian itu pada awalnya sebagai bagian dari perencanaan tetapi dapat merevisinya setelah memperoleh informasi baru. Sebagai contoh, penilaian awal *Going Concern* mungkin perlu direvisi jika auditor menemukan selama audit bahwa perusahaan telah gagal membayar pinjaman, kehilangan pelanggan utamanya, atau memutuskan untuk membuang aset substansial untuk melunasi pinjaman.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *debt Default* menjadi salah satu indikator atas opini audit *Going Concern*. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukann oleh Penelitian yang dilakukann oleh Aghisna, M. R., Sumiati, A., & Purwohedi, U. (2023) menunjukkan bahwa jika Perusahaan tidak bisa membayar utangnya baik jangka pendek dan bunganya maka semakin besar auditor akan memberikan opini audit *Going Concern*. Begitu pun penelitian yang dilakukann oleh Dewi, IDANS, & Latrini, MY (2018) yang menunjukkan hasil bahwa *Default* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *Going Concern*.

#### **2.4.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, dan *Default* Terhadap Opini Audit *Going Concern***

Salah satu komponen laporan keuangan ialah laporan laba rugi yang merupakan fungsi utama dari penggunaan laporan keuangan. Dimana laporan laba rugi menggambarkan kinerja perusahaan baik atau tidaknya dalam periode tertentu. Namun laporan keuangan tidak hanya dinilai berdasarkan laba atau ruginya saja melainkan kewajaran laporan keuangan tersebut yang dapat dinilai oleh seseorang yang *independen* yang tidak memihak pihak manapun, untuk menilai kewajaran

sebuah laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan maka harus ada auditor *independen* yang bertugas untuk mengaudit sebuah entitas.

Laporan auditor *independen* nanti bisa berguna untuk calon investor dan kreditur untuk melihat kondisi perusahaan yang sebenarnya dan laporan auditor itu bisa berguna untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap entitas yang sejalan dengan teori legitimasi yang mana kinerja sosial berkaitan dengan kinerja keuangan sebuah entitas. Dan salah satu jenis laporan auditor yang dihindari oleh setiap perusahaan besar maupun perusahaan skala kecil adalah laporan audit *Going Concern*.

Dalam bukunya yang berjudul “Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach” Arens (2014:183) menyatakan bahwa:

*Assess the Entity's Ability to Continue as a Going Concern Analytical procedures are often a useful indicator for determining whether the client company has financial problems. Certain analytical procedures can help the auditor assess the likelihood of failure. For example, if a higher-than-normal ratio of long-term debt to net worth is combined with a lower-than-average ratio of profits to total assets, a relatively high risk of financial failure may be indicated. Not only will such conditions affect the audit plan, they may indicate that substantial doubt exists about the entity's ability to continue as a Going Concern.*

Terjemahan:

Menilai Kemampuan Entitas untuk Melanjutkan Kelangsungan Hidup Prosedur analitis seringkali merupakan indikator yang berguna untuk menentukan apakah perusahaan klien memiliki masalah keuangan. Prosedur analitis tertentu dapat membantu auditor menilai kemungkinan kegagalan. Misalnya, jika rasio utang jangka panjang terhadap kekayaan bersih yang lebih tinggi dari normal dikombinasikan dengan rasio laba terhadap total aset yang lebih rendah dari rata-rata, risiko kegagalan keuangan yang relatif tinggi dapat diindikasikan. Kondisi tersebut tidak hanya akan mempengaruhi rencana audit, tetapi juga dapat mengindikasikan bahwa terdapat keraguan substansial mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan usahanya

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat saya simpulkan bahwa setiap entitas yang berskala besar maupun kecil jika perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban dan adanya restrukturisasi utang mencerminkan arus kas perusahaan dalam keadaan yang tidak sehat atau perusahaan mengalami yang namanya *financial distress* kondisi ini bisa menjadi pemicu auditor mengeluarkan opini audit *Going Concern*.

## **2.5. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Sebagai pembanding kebenaran, kejelasan serta keakuratan dalam penelitian. Maka, peneliti memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu dari beberapa jurnal nasional, internasional, dan karya ilmiah terdahulu yang memiliki variabel yang berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan sebagai bahan pembanding.

Dari penelitian yang dilakukann sebelumnya oleh peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *Financial Distress*, dan *default* terhadap penerimaan opini *Going Concern* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Aghisna, M. R., Sumiati, A., & Purwohedhi, U. (2023).	Pengaruh <i>Financial Distress, Debt Default</i> , dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i> Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Pada Perusahaan Transportasi, Infrastruktur, dan Utilitas Tahun 2019-2021.	<i>Financial Distress (X<sub>1</sub>)</i> , <i>Debt Default (X<sub>2</sub>)</i> , Pertumbuhan Perusahaan ( <i>X<sub>3</sub></i> ), dan Opini Audit <i>Going Concern (Y)</i>	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat sekunder. Data sekunder pada umumnya berupa laporan, catatan, dan bukti yang dipublikasikan secara umum maupun tidak. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan sektor Transportasi, Infrastruktur dan Utilitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi <i>Financial Distress</i> suatu entitas perusahaan maka semakin besar auditor dalam memberikan opini audit <i>Going Concern</i> nya. Selain itu semakin tinggi perusahaan mengalami <i>debt Default</i> atau kondisi dimana perusahaan tidak dapat membayar utangnya baik jangka pendek dan bunganya maka semakin besar auditor akan memberikan opini audit <i>Going Concern</i> . Dan tidak terdapat pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan opini audit <i>Going Concern</i> di perusahaan transportasi, infrastruktur, dan utilitas yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019-2021. Artinya, penurunan atau peningkatan yang dialami

					perusahaan dari sisi pendapatan perusahaan tidak memiliki dampak terhadap penerimaan opini audit <i>Going Concern</i> .
2	Priska Liliani (2021)	Pengaruh <i>Financial Distress, Debt Default</i> , Dan Audit <i>Tenure</i> Terhadap Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2017	<i>Financial Distress (X<sub>1</sub>)</i> , <i>Debt Default (X<sub>2</sub>)</i> , Audit <i>Tenure (X<sub>3</sub>)</i> , Opini Audit <i>Going Concern (Y)</i>	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat sekunder. Data sekunder pada umumnya berupa laporan, catatan, dan bukti yang dipublikasikan secara umum maupun tidak. Data yang dikumpulkan berupa laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 – 2017	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Financial Distress</i> memiliki arah pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>Going Concern</i> . Sedangkan <i>debt Default</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>Going Concern</i> . Dan Audit <i>Tenure</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>Going Concern</i> .
3	Dewi, I. D. A. N. S., & Latrini, M. Y. (2018).	Pengaruh <i>Financial Distress</i> dan <i>Debt Default</i> Pada Opini Audit <i>Going Concern</i>	<i>Financial Distress (X<sub>1</sub>)</i> , <i>Debt Default (X<sub>2</sub>)</i> , Opini Audit <i>Going Concern (Y)</i>	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif dengan tipe kausalitas.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Financial Distress</i> memiliki pengaruh negatif pada opini audit <i>Going Concern</i> . Sedangkan <i>debt Default</i> berpengaruh positif pada opini audit <i>Going Concern</i> .

4	Indra K (2018)	Pengaruh Kondisi Keuangan, <i>Financial Distress</i> , Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i>	Kondisi Keuangan ( $X_1$ ), <i>Financial Distress</i> ( $X_2$ ), Profitabilitas ( $X_3$ ), Ukuran Perusahaan ( $X_4$ ), Opini Audit <i>Going Concern</i> ( $Y$ )	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dari perusahaan sector pertambangan yang listing di BEI tahun 2011-2015, laporan auditor <i>independen</i> atas laporan keuangan perusahaan, jurnal-jurnal penelitian, serta data-data pustaka yang lain yang dapat menunjang terlaksananya penelitian ini. Data laporan keuangan diperoleh dari website BEI ( <a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a> ). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap opini audit <i>Going Concern. Financial Distres</i> berpengaruh positif terhadap opini audit <i>Going Concern</i> . Profitabilitas berpengaruh positif terhadap opini audit <i>Going Concern</i> . Sedangkan Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit <i>Going Concern</i> .
5	Cynthia Widya, M. (2020).	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i> Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2018	Ukuran Perusahaan ( $X_1$ ), Pertumbuhan Perusahaan ( $X_2$ ), Opini Audit <i>Going Concern</i> ( $Y$ )	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap opini audit <i>Going Concern</i> .

Dari beberapa penelitian diatas, posisi penelitian penulis adalah meneliti ulang penelitian terdahulu yang dilakukann oleh Dewi, D. A. N. S., & Latrini, M. Y. (2018). yang berjudul “Pengaruh *Financial Distress* dan *Debt Default* Pada Opini Audit *Going Concern*”. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukann oleh Dewi, D. A. N. S., & Latrini, M. Y. (2018). dengan penelitian yang dilakukann oleh penulis. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel X, yaitu Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, dan *Default* serta dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi data panel dalam proses pengolahan data sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 2 (dua) variabel X, yaitu *Financial Distress* dan *Debt Default* serta dalam penelitian terdahulu peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif dengan tipe kausalitas.

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti menemukan adanya *evidence gap* atau inkonsistensi hasil penelitian dari peneliti terdahulu. peneliti menemukan titik kesenjangan antara fenomena yang tidak asing dengan bukti lapangan selama proses penelitian. Serta saran dari penelitian terdahulu yang memotivasi peneliti untuk mengambil penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, dan *Default* Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022”.

## **2.6. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dibuat untuk mengetahui alur penelitian secara konseptual dan dibuat oleh peneliti dan menjelaskan tentang hubungan antara

variabel dengan variabel lainnya. Menurut Sugiyono (2019:95) kerangka berpikir merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagaimana masalah yang penting.

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat topik mengenai kelangsungan usaha (*Going Concern*) dikaitkan dengan beberapa variabel lain di antaranya adalah ukuran perusahaan, *Financial Distress*, dan *Default*. Untuk menjelaskan hubungan antara masing-masing variabel *independen* terhadap variabel *dependen* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Standar Audit 570 dinyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit *Going Concern*.

Dalam pernyataannya Junaidi, Jogiyanto Hartono (2010) menyatakan bahwa:

Perusahaan dengan total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan karena dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam waktu yang panjang. Perusahaan besar juga dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan ukuran perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan perusahaannya semakin besar perusahaan, perusahaan memiliki kemampuan lebih dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan keuangannya namun bukan berarti perusahaan besar akan lepas dari opini audit *Going Concern*, opini ini diberikan dengan banyak pertimbangan dari seorang auditor. Maka dari itu ukuran perusahaan mempengaruhi opini audit *Going Concern*. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukann oleh Indra K (2018) hasil penelitian menunjukkan

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit dengan penekanan *Going Concern*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki kemungkinan kecil untuk menerima opini audit *Going Concern*.

Dalam bukunya Khaira Amalia Fachrudin (2008:64) menyatakan bahwa:

Perusahaan yang lebih besar lebih mungkin menjadi bangkrut karena sulit menjaga kelangsungan operasi selama masa kesulitan keuangan (*financial distress*). Likuiditas dan profitabilitas berpengaruh, semakin meningkat, kemungkinan bangkrut berkurang.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *financial distress* merupakan kondisi keuangan yang memburuk sehingga berpotensi tidak bisa menjaga kelangsungan operasinya sehingga auditor bisa mengeluarkan opini audit *Going Concern*. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aghisna, M. R. dkk (2023) menunjukkan hasil yang positif bahwa *Financial Distress* berpengaruh pada penerimaan opini audit *Going Concern*. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh R., Sumiati, A., & Purwohedhi, U. (2023) yang menyatakan bahwa *Financial Distress* mempunyai pengaruh yang positif terhadap auditor dalam memberikan opini audit *Going Concern*.

Dalam bukunya Arens (2014:768) menyatakan bahwa:

*“Auditing standards require the auditor to evaluate whether there is a substantial doubt about a client’s ability to continue as a Going Concern for at least one year beyond the balance sheet date. Auditors make that assessment initially as a part of planning but may revise it after obtaining new information. For example, an initial assessment of Going Concern may need revision if the auditor discovers during the audit that the company has Defaulted on a loan, lost its primary customer, or decided to dispose of substantial assets to pay off loans.”*

Terjemahan:

Standar audit mengharuskan auditor untuk mengevaluasi apakah ada keraguan substantif tentang kemampuan klien untuk melanjutkan kelangsungan hidup selama setidaknya satu tahun setelah tanggal neraca. Auditor membuat penilaian itu pada awalnya sebagai bagian dari perencanaan tetapi dapat merevisinya setelah memperoleh informasi baru. Sebagai contoh, penilaian awal *Going Concern* mungkin perlu direvisi jika auditor menemukan selama audit bahwa perusahaan telah gagal membayar pinjaman, kehilangan pelanggan utamanya, atau memutuskan untuk membuang aset substansial untuk melunasi pinjaman.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *debt Default* menjadi salah satu indikator atas opini audit *Going Concern*. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukann oleh Penelitian yang dilakukann oleh Aghisna, M. R., Sumiati, A., & Purwohedi, U. (2023) menunjukkan bahwa jika Perusahaan tidak bisa membayar utangnya baik jangka pendek dan bunganya maka semakin besar auditor akan memberikan opini audit *Going Concern*. Begitu pun penelitian yang dilakukann oleh Dewi, IDANS, & Latrini, MY (2018) yang menunjukkan hasil bahwa *Default* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *Going Concern*.

Salah satu komponen laporan keuangan ialah laporan laba rugi yang merupakan fungsi utama dari penggunaan laporan keuangan. Dimana laporan laba rugi menggambarkan kinerja perusahaan baik atau tidaknya dalam periode tertentu. Namun laporan keuangan tidak hanya dinilai berdasarkan laba atau ruginya saja melainkan kewajaran laporan keuangan tersebut yang dapat dinilai oleh seseorang yang *independen* yang tidak memihak pihak manapun, untuk menilai kewajaran sebuah laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan maka harus ada auditor *independen* yang bertugas untuk mengaudit sebuah entitas.

Laporan auditor *independen* nanti bisa berguna untuk calon investor dan kreditur untuk melihat kondisi perusahaan yang sebenarnya dan laporan auditor itu

bisa berguna untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap entitas yang sejalan dengan teori legitimasi yang mana kinerja sosial berkaitan dengan kinerja keuangan sebuah entitas. Dan salah satu jenis laporan auditor yang dihindari oleh setiap perusahaan besar maupun perusahaan skala kecil adalah laporan audit *Going Concern*.

Dalam bukunya yang berjudul "*Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*" Arens (2014:183) menyatakan bahwa:

*Assess the Entity's Ability to Continue as a Going Concern Analytical procedures are often a useful indicator for determining whether the client company has financial problems. Certain analytical procedures can help the auditor assess the likelihood of failure. For example, if a higher-than-normal ratio of long-term debt to net worth is combined with a lower-than-average ratio of profits to total assets, a relatively high risk of financial failure may be indicated. Not only will such conditions affect the audit plan, they may indicate that substantial doubt exists about the entity's ability to continue as a Going Concern.*

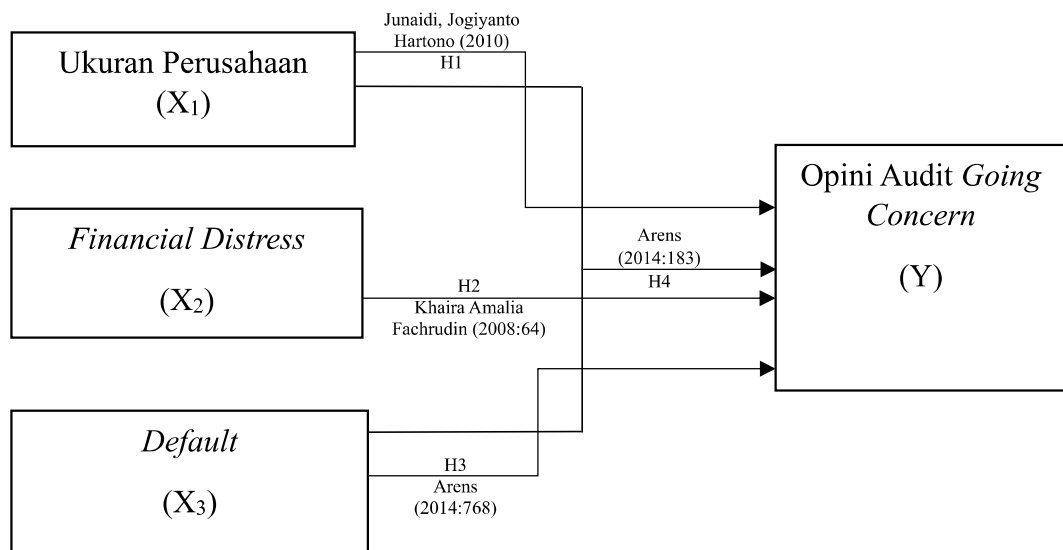
Terjemahan:

Menilai Kemampuan Entitas untuk Melanjutkan Kelangsungan Hidup Prosedur analitis seringkali merupakan indikator yang berguna untuk menentukan apakah perusahaan klien memiliki masalah keuangan. Prosedur analitis tertentu dapat membantu auditor menilai kemungkinan kegagalan. Misalnya, jika rasio utang jangka panjang terhadap kekayaan bersih yang lebih tinggi dari normal dikombinasikan dengan rasio laba terhadap total aset yang lebih rendah dari rata-rata, risiko kegagalan keuangan yang relatif tinggi dapat diindikasikan. Kondisi tersebut tidak hanya akan mempengaruhi rencana audit, tetapi juga dapat mengindikasikan bahwa terdapat keraguan substansial mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan usahanya

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat saya simpulkan bahwa setiap entitas yang berskala besar maupun kecil jika perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban dan adanya restrukturisasi utang mencerminkan arus kas perusahaan dalam keadaan yang tidak sehat atau perusahaan mengalami yang namanya *financial distress* kondisi ini bisa menjadi pemicu auditor mengeluarkan opini audit *Going Concern*.



### 2.6.1. Kerangka Konseptual Penelitian



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian**

### 2.7. Hipotesis penelitian

Berdasarkan uraian penjabaran teori dan perumusan masalah serta penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini maka dapat dirumuskan dugaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Opini Audit *Going Concern*.

H<sub>2</sub>: *Financial Distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Opini Audit *Going Concern*.

H<sub>3</sub>: *Default* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Opini Audit *Going Concern*.

H<sub>4</sub>: Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, dan *Default* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Opini Audit *Going Concern*.